1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN/ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RISIKO KE DEPAN

1.1. Gambaran Umum

Pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum termasuk dalam cakupan wilayah penghitungan inflasi resmi. Oleh karena itu, pemantauan perkembangan harga daerah mengacu pada Indeks Perkembangan Harga (IPH), pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta kondisi pasokan dan distribusi komoditas strategis.

Selama Triwulan III Tahun 2026, yaitu Juli sampai dengan September, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah terkait melaksanakan pemantauan harga, pengawasan distribusi, penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pengembangan kios pangan, sidak pasar, serta kegiatan koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor.

Berdasarkan hasil pemantauan harga oleh Dinas Perdagangan terhadap 35 komoditas, perkembangan harga selama periode tersebut menunjukkan kondisi yang beragam. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan, beberapa mengalami penurunan, sedangkan komoditas lainnya relatif stabil. Kenaikan harga paling menonjol terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit merah pada September 2026.

Kondisi ini menjadi perhatian TPID karena perubahan harga pangan strategis dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan tekanan harga daerah. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memastikan keterjangkauan harga pangan.

1.2. Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH)

Berdasarkan data IPH mingguan yang tersedia, perkembangan harga di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan perubahan dari angka negatif pada Juli menjadi positif pada Agustus, kemudian meningkat pada September.

Tabel 1. Perkembangan IPH Mingguan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Triwulan III Tahun 2026

No.	Periode	IPH sesuai data sumber	Komoditas yang Memengaruhi
1	Juli M1	-5,16	Cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras
2	Juli M2	-5,79	Cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras
3	Juli M3	-5,96	Cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras
4	Juli M4	-5,74	Cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras

No.	Periode	IPH sesuai data sumber	Komoditas yang Memengaruhi
5	Juli M5	-5,75	Cabai rawit, bawang merah, cabai merah
6	Agustus M1	98	Daging ayam ras, beras
7	Agustus M2	0,94	Daging ayam ras, beras
8	Agustus M3	1,39	Daging ayam ras, beras, cabai rawit
9	Agustus M4	2,24	Daging ayam ras, beras, cabai rawit
10	September M1	7,61	Cabai rawit, cabai merah, daging sapi
11	September M2	8,69	Cabai rawit, cabai merah, daging sapi
12	September M3	8,22	Cabai rawit, cabai merah, beras
13	September M4	7,87	Cabai rawit, cabai merah, beras

Sumber: Data IPH yang disampaikan untuk penyusunan laporan TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2026.

Pada Juli 2026, komoditas yang tercatat memengaruhi perkembangan IPH terutama cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras. Pada Agustus, komoditas daging ayam ras dan beras menjadi komoditas yang memengaruhi IPH, sementara cabai rawit mulai tercatat pada minggu ketiga dan keempat.

Pada September, IPH meningkat dan mencapai angka tertinggi pada minggu kedua sebesar 8,69, kemudian menurun menjadi 8,22 pada minggu ketiga dan 7,87 pada minggu keempat. Cabai rawit dan cabai merah menjadi komoditas utama yang tercatat memengaruhi IPH selama September.

Perkembangan tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap kenaikan harga komoditas pangan strategis, khususnya cabai. Namun, angka IPH Juli dan Agustus minggu pertama masih memerlukan konfirmasi format penulisannya berdasarkan data sumber asli sebelum tabel ditetapkan sebagai data final.

1.3. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan pemantauan harga terhadap 35 komoditas selama Juli sampai dengan September 2026. Data tersebut digunakan untuk mengetahui perubahan harga di pasar dan mengidentifikasi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian harga.

Tabel 2. Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Periode Juli–September 2026

No.	Komoditas	Satuan pada Data Sumber	Juli (Rp)	Agustus (Rp)	September (Rp)
1	Beras Cap Trisakti (Medium)	Kg	14.333	15.500	16.400
2	Beras Cap Pondan (Medium)	Kg	13.000	13.900	14.500
3	Beras Cap Membrano (Premium)	Kg	16.000	16.000	16.400
4	Beras Cap Serayu (Premium)	Kg	16.333	17.000	17.000
5	Beras SPHP Bulog	Kg	12.500	12.500	12.500
6	Cabai Merah Keriting	Kg	53.066	50.000	113.800
7	Cabai Rawit Merah	Kg	41.741	69.166	132.166
8	Bawang Merah	Kg	47.466	37.266	38.206
9	Minyak Goreng Curah, 1 Ltr	liter	21.000	19.965	19.560
10	Minyak Goreng Kemasan Premium, 1 liter	Liter	23.000	23.000	23.000
11	Minyakita, 1 Ltr	Liter	15.700	15.700	15.700
12	Tepung Terigu	Kg	15.000	15.000	15.000
13	Daging Ayam Ras Karkas	Kg	37.520	45.000	38.013
14	Telur Ayam Ras	Kg	34.700	34.700	34.700
15	Daging Sapi Paha Belakang	Kg	135.000	135.000	136.500
16	Ikan Teri	bks	160.000	160.000	166.000
17	Mi Instan, 1 bks	Bks	3.500	3.500	3.500
18	Bawang Putih Honan,1 kg	Kg	52.000	42.333	40.000
19	Bawang Bombai, 1 Kg	Kg	45.000	45.000	46.500
20	Garam Halus, 1 Kg	Kg	10.000	10.000	10.000
21	Susu Kental Manis,370 gr	gr	13.000	13.000	13.000
22	Susu Bubuk (setara Dancow), 400 gr	gr	58.000	58.000	57.350
23	Susu Bubuk Balita (setara SGM), 400 gr	gr;	45.000	45.000	44.000
24	Tempe Bungkus	Kg	25.000	25.000	24.400

No.	Komoditas	Satuan pada Data Sumber	Juli (Rp)	Agustus (Rp)	September (Rp)
25	Tahu Putih	Kg	13.000	13.000	13.000
26	Udang Basah	Kg	69.000	65.000	65.000
27	Tomat	Kg	14.040	5.300	7.260
28	Kentang Sedang	Kg	20.800	22.200	21.000
29	Sawi Hijau	Kg	10.000	10.000	10.000
30	Kangkung	Kg	10.000	10.000	10.000
31	Ketimun Sedang	Kg	10.000	10.000	10.000
32	Kacang Panjang	Kg	10.000	10.000	10.000
33	Ketela Pohon, 1 kg	Kg	10.000	10.000	10.000
34	Kacang Hijau, 1 kg	Kg	35.000	35.000	35.000
35	Kacang Tanah, 1 kg	Kg	40.000	40.000	48.333

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2026.

1.3.1. Perkembangan Harga Beras

Harga beras medium dan premium secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode pemantauan.

Beras Cap Trisakti meningkat dari Rp14.333/kg pada Juli menjadi Rp16.400/kg pada September. Beras Cap Pondan meningkat dari Rp13.000/kg menjadi Rp14.500/kg. Beras Cap Membrano meningkat dari Rp16.000/kg menjadi Rp16.400/kg, sedangkan Beras Cap Serayu meningkat dari Rp16.333/kg menjadi Rp17.000/kg.

Di sisi lain, harga beras SPHP Bulog relatif stabil sebesar Rp12.500/kg selama tiga bulan pemantauan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan beras SPHP agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau.

1.3.2. Perkembangan Harga Cabai Merah Keriting dan Cabai Rawit Merah

Cabai merah keriting dan cabai rawit merah merupakan komoditas dengan kenaikan harga paling signifikan pada September 2026.

Harga cabai merah keriting turun dari Rp53.066/kg pada Juli menjadi Rp50.000/kg pada Agustus, kemudian meningkat menjadi Rp113.800/kg pada September. Harga September tersebut meningkat sekitar 127,6 persen dibandingkan Agustus.

Harga cabai rawit merah meningkat dari Rp41.741/kg pada Juli menjadi Rp69.166/kg pada Agustus dan Rp132.166/kg pada September. Dibandingkan Agustus, harga cabai rawit merah pada September meningkat sekitar 91,1 persen.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, kenaikan harga cabai di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkaitan dengan keterbatasan pasokan di pasar dan berkurangnya produksi cabai lokal. Kondisi cuaca ekstrem diduga turut memengaruhi produksi lokal. Pengaruh El Niño perlu dikonfirmasi melalui data cuaca dan informasi dari instansi terkait.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pasokan dari luar daerah, koordinasi dengan distributor, serta dukungan terhadap produksi cabai lokal agar gejolak harga dapat diantisipasi.

1.3.3. Perkembangan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih

Harga bawang merah turun dari Rp47.466 pada Juli menjadi Rp37.266 pada Agustus, kemudian meningkat menjadi Rp38.206 pada September. Walaupun terdapat kenaikan pada September, harganya masih lebih rendah dibandingkan Juli.

Harga bawang putih Honan turun dari Rp52.000 pada Juli menjadi Rp42.333 pada Agustus dan Rp40.000 pada September.

Dinas Perdagangan telah melaksanakan kerja sama dengan distributor bawang merah di Gorontalo sebagai upaya memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi. Kerja sama tersebut perlu terus dipantau berdasarkan realisasi pengiriman, volume pasokan, dan perkembangan harga di pasar.

1.3.4. Perkembangan Harga Minyak Goreng dan Barang Kebutuhan Lainnya

Harga minyak goreng curah menurun dari Rp21.000 pada Juli menjadi Rp19.965 pada Agustus dan Rp19.560 pada September. Harga minyak goreng kemasan premium stabil sebesar Rp23.000, sedangkan Minyakita stabil sebesar Rp15.700 selama periode pemantauan.

Harga tepung terigu stabil sebesar Rp15.000. Harga mi instan stabil sebesar Rp3.500 sesuai angka pada sumber data, sedangkan harga garam halus dan susu kental manis juga relatif stabil.

Harga susu bubuk setara Dancow menurun dari Rp58.000 menjadi Rp57.350 pada September. Susu bubuk balita setara SGM turun dari Rp45.000 menjadi Rp44.000. Harga tempe turun dari Rp25.000 menjadi Rp24.400, sedangkan tahu putih stabil sebesar Rp13.000.

1.3.5. Perkembangan Harga Daging, Telur, Ikan, dan Komoditas Lainnya

Harga daging ayam ras meningkat dari Rp37.520 pada Juli menjadi Rp45.000 pada Agustus, kemudian turun menjadi Rp38.013 pada September. Harga telur ayam ras stabil sebesar Rp34.700 selama periode pemantauan.

Harga daging sapi paha belakang meningkat dari Rp135.000 pada Juli dan Agustus menjadi Rp136.500 pada September. Harga ikan teri meningkat dari Rp160.000 menjadi Rp166.000, sedangkan harga udang basah turun dari Rp69.000 menjadi Rp65.000 dan bertahan hingga September.

Harga tomat mengalami penurunan dari Rp14.040 pada Juli menjadi Rp5.300 pada Agustus, kemudian meningkat menjadi Rp7.260 pada September. Harga kentang sedang naik dari Rp20.800 pada Juli menjadi Rp22.200 pada Agustus, kemudian turun menjadi Rp21.000 pada

September.

Sementara itu, harga sawi hijau, kangkung, ketimun sedang, kacang panjang, dan ketela pohon relatif stabil sebesar Rp10.000 selama periode pemantauan. Harga kacang hijau stabil sebesar Rp35.000, sedangkan harga kacang tanah meningkat dari Rp40.000 pada Juli dan Agustus menjadi Rp48.333 pada September.

1.4. Risiko Pengendalian Inflasi ke Depan

Berdasarkan perkembangan IPH dan hasil pemantauan harga selama Triwulan III Tahun 2026, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.

1. **Keterbatasan pasokan cabai.** Penurunan produksi lokal dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat meningkatkan risiko lonjakan harga.
2. **Cuaca ekstrem.** Kondisi cuaca dapat memengaruhi produktivitas hortikultura, jadwal panen, dan kelancaran distribusi. Pengaruh El Niño perlu dipantau berdasarkan informasi resmi.
3. **Kenaikan harga beras.** Peningkatan harga beras medium dan premium perlu diantisipasi melalui pengamanan stok, distribusi, dan ketersediaan beras SPHP.
4. **Gangguan distribusi antardaerah.** Keterlambatan pasokan atau peningkatan biaya angkutan dapat memengaruhi harga komoditas strategis.
5. **Fluktuasi harga pangan segar.** Komoditas seperti cabai, tomat, dan sayuran rentan mengalami perubahan harga akibat kondisi pasokan dan permintaan.
6. **Dampak terhadap daya beli masyarakat.** Kenaikan harga sejumlah bahan pangan dapat meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok masyarakat rentan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

2.1. Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Strategis

Permasalahan utama pengendalian harga selama Triwulan III Tahun 2026 adalah kenaikan harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah pada September. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan IPH yang menunjukkan peningkatan pada bulan yang sama.

Selain cabai, harga beras medium dan premium juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Fluktuasi harga daging ayam ras serta kenaikan harga beberapa komoditas lain perlu tetap dipantau untuk mengantisipasi tekanan harga lanjutan.

2.2. Keterbatasan Pasokan dan Penurunan Produksi Cabai Lokal

Ketersediaan cabai di pasar belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berkurangnya produksi cabai lokal yang diduga dipengaruhi cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri.

Kondisi tersebut meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Apabila daerah pemasok mengalami gangguan produksi atau distribusi, harga cabai di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpotensi meningkat lebih lanjut.

2.3. Ketergantungan terhadap Distribusi Antardaerah

Pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis masih membutuhkan pasokan dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena itu, kerja sama dengan distributor dan daerah pemasok perlu diperkuat untuk menjaga kesinambungan pasokan dan mengantisipasi gangguan distribusi.

2.4. Kebutuhan Penguatan Intervensi Pasar

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah perlu disesuaikan dengan perkembangan harga dan kebutuhan masyarakat. Intervensi pasar perlu diprioritaskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan atau keterbatasan pasokan.

Selain itu, penyaluran bantuan pangan dan CPPD perlu terus diawasi untuk memastikan ketepatan sasaran dan kelancaran pelaksanaan program.

2.5. Optimalisasi Kios Pangan

Dari lima kios pangan outlet individu yang telah dibentuk atau dikembangkan, dua kios tercatat aktif, sedangkan tiga kios lainnya masih dalam tahap pendaftaran kembali.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan administrasi dan penguatan operasional agar jaringan kios pangan dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mendukung akses masyarakat terhadap bahan pangan.

2.6. Penguatan Data dan Evaluasi

Pemantauan harga dan IPH perlu didukung data yang konsisten, akurat, serta memiliki satuan yang jelas. Data pelaksanaan kegiatan TPID juga perlu dilengkapi dengan tanggal, lokasi, volume realisasi, jumlah penerima manfaat, serta tindak lanjut.

Ketersediaan data yang baik diperlukan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan menjadi dasar penentuan langkah pengendalian berikutnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

3.1. Pengawasan dan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Juli–September 2026

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi Juli sampai dengan September 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, bantuan pangan disalurkan kepada 10.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di enam kecamatan dengan total beras sebanyak 305.820 kg atau 305,82 ton. Setiap KPM memperoleh 30 kg beras untuk alokasi tiga bulan, setara dengan 10 kg per bulan.

Penyaluran bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara. Kegiatan ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,

meringankan beban pengeluaran rumah tangga, dan memperkuat ketahanan pangan.

Tabel 3. Data Penyaluran Bantuan Pangan Periode Juli–September Tahun 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima (KPM)	Jumlah Beras (kg)
1	Sangkub	1.326	39.780
2	Bintauna	1.851	55.530
3	Bolangitang Timur	2.198	65.940
4	Bolangitang Barat	1.886	56.580
5	Kaidipang	1.449	43.470
6	Pinogaluman	1.484	44.520
Total		**10.194**	**305.820**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Bolangitang Timur memiliki jumlah penerima terbanyak, yaitu 2.198 KPM dengan alokasi 65.940 kg beras. Kecamatan Sangkub memiliki 1.326 KPM dengan alokasi 39.780 kg beras.

Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pengawasan untuk memastikan penyaluran sesuai alokasi dan diterima oleh penerima sasaran.

3.2. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2026

Selain penyaluran bantuan pangan reguler, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berupa beras untuk penanganan daerah rawan pangan.

Tabel 4. Rekapitulasi Penyaluran CPPD Beras untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa Rawan Pangan	Jumlah KK	Jumlah Beras Diterima (kg)
1	Sangkub	11	329	3.290
2	Bintauna	15	516	5.160
3	Bolangitang Timur	4	130	1.300
4	Bolangitang Barat	12	491	4.910
5	Kaidipang	9	280	2.800
6	Pinogaluman	10	354	3.540
Total		**61**	**2.100**	**21.000**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2026.

Penyaluran CPPD mencakup 61 desa rawan pangan dengan jumlah penerima sebanyak 2.100

kepala keluarga dan total beras sebanyak 21.000 kg atau 21 ton.

Kecamatan Bintauna memiliki jumlah desa rawan pangan terbanyak, yaitu 15 desa, dengan 516 kepala keluarga dan alokasi beras sebanyak 5.160 kg.

Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang menghadapi kerawanan pangan serta memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Penyaluran CPPD juga menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap risiko kerawanan pangan akibat keterbatasan akses pangan, gangguan distribusi, dan kondisi lain yang memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

3.3. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah pada 8 September 2026 di Kecamatan Bintauna melalui kerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perum Bulog Cabang Bolaang Mongondow.

Komoditas yang disediakan dalam kegiatan tersebut adalah beras SPHP Bulog sebanyak 1.500 kg atau 1,5 ton, dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kg atau setara Rp11.600/kg.

Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga beras SPHP dalam pemantauan pasar September yang tercatat Rp12.500/kg. Dengan demikian, harga GPM lebih rendah Rp900/kg berdasarkan perbandingan kedua data tersebut.

Pelaksanaan GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, memperluas akses pangan, dan mendukung stabilisasi pasokan serta harga. Untuk evaluasi lebih lanjut, perlu dilengkapi data realisasi penjualan, jumlah pembeli, serta sisa stok setelah kegiatan.

3.4. Pembentukan dan Pengembangan Kios Pangan

Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan Tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pembentukan dan pengembangan kios pangan melalui outlet individu.

Terdapat lima kios pangan outlet individu yang telah dibentuk atau dikembangkan. Dari jumlah tersebut, dua kios tercatat aktif, yaitu:

1. ***Kios Fitri Boroko*** dengan volume penyaluran sebanyak 8.775 kg.
2. ***Kios Murni Bintauna*** dengan volume penyaluran sebanyak 6.000 kg.

Total volume penyaluran yang tercatat pada kedua kios aktif mencapai 14.775 kg atau 14,775 ton. Tiga kios lainnya masih dalam tahap pendaftaran kembali.

Pengembangan kios pangan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan, mendukung kelancaran distribusi, dan membantu menjaga keterjangkauan harga. Pendampingan terhadap tiga kios yang belum aktif perlu dilakukan agar proses pendaftaran kembali dapat diselesaikan dan operasional kios dapat berjalan optimal.

Periode realisasi volume penyaluran kedua kios aktif perlu diperjelas dalam dokumen pendukung agar evaluasi kinerja sesuai dengan periode laporan.

3.5. Pelaksanaan Sidak Pasar

TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar beberapa kali selama periode pelaporan.

Kegiatan ini bertujuan memantau perkembangan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta kondisi perdagangan barang kebutuhan pokok dan penting.

Sidak pasar juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga dan mengetahui kendala pasokan di tingkat pedagang. Hasil pelaksanaan sidak perlu didokumentasikan dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya.

3.6. Sidak BBM di SPBU dan Pemantauan Jasa Laundry

Selain pemantauan pasar, TPID melaksanakan sidak BBM di SPBU serta pemantauan pada tempat-tempat usaha jasa laundry.

Sidak BBM bertujuan memantau ketersediaan dan kelancaran pelayanan bahan bakar kepada masyarakat. Sementara itu, pemantauan usaha laundry dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan tarif jasa dan faktor biaya usaha.

Hasil pemantauan perlu dilengkapi dengan data lokasi, tanggal pelaksanaan, temuan, dan tindak lanjut. Pemantauan jasa laundry sebaiknya dianalisis secara terpisah dari komoditas pangan agar evaluasi perkembangan harga dapat dilakukan secara proporsional.

3.7. Kerja Sama Distribusi Bawang Merah

Dinas Perdagangan melaksanakan kerja sama dengan distributor bawang merah di Gorontalo sebagai upaya memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi bawang merah ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan komoditas dan mengantisipasi kenaikan harga akibat gangguan pasokan.

Pemantauan lanjutan diperlukan terhadap volume pengiriman, jadwal distribusi, harga jual, dan kesinambungan pasokan untuk mengetahui efektivitas kerja sama tersebut.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

4.1. Evaluasi Perkembangan IPH dan Harga Pasar

Perkembangan IPH selama Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan perubahan dari angka negatif pada Juli menjadi positif pada Agustus, kemudian meningkat pada September. Cabai rawit dan cabai merah tercatat sebagai komoditas utama yang memengaruhi IPH pada September.

Hasil pemantauan harga Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa harga cabai merah keriting meningkat dari Rp50.000/kg pada Agustus menjadi Rp113.800/kg pada September. Harga

cabai rawit merah juga meningkat dari Rp69.166/kg menjadi Rp132.166/kg pada periode yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengamanan pasokan dan koordinasi distribusi, khususnya untuk komoditas cabai. Di samping itu, kecenderungan kenaikan harga beras medium dan premium juga perlu dipantau secara berkala.

4.2. Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan dan CPPD

Penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 305.820 kg kepada 10.194 KPM merupakan salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama alokasi Juli–September 2026.

Sementara itu, penyaluran CPPD sebanyak 21.000 kg kepada 2.100 kepala keluarga di 61 desa rawan pangan mendukung penanganan kerawanan pangan di tingkat rumah tangga.

Kedua program tersebut telah menyediakan intervensi pangan bagi kelompok sasaran. Namun, dampaknya terhadap stabilitas harga pasar secara keseluruhan perlu dinilai berdasarkan ketepatan sasaran, realisasi penyaluran, kondisi pasokan, dan perubahan harga di wilayah penerima.

4.3. Evaluasi Pelaksanaan GPM

GPM di Kecamatan Bintauna pada 8 September 2026 menyediakan beras SPHP sebanyak 1.500 kg dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kg.

Berdasarkan data pemantauan pasar, harga tersebut lebih rendah daripada harga beras SPHP yang tercatat Rp12.500/kg pada September. Kegiatan ini memberikan alternatif akses terhadap beras dengan harga lebih terjangkau berdasarkan perbandingan harga yang tersedia.

Efektivitas GPM perlu dievaluasi lebih lanjut menggunakan data volume penjualan yang terealisasi, jumlah masyarakat yang dilayani, dan perkembangan harga setelah pelaksanaan kegiatan.

4.4. Evaluasi Pengembangan Kios Pangan

Pembentukan lima kios pangan outlet individu merupakan upaya untuk memperluas jaringan distribusi pangan. Dua kios aktif, yaitu Kios Fitri Boroko dan Kios Murni Bintauna, mencatat total volume penyaluran 14.775 kg berdasarkan data yang disampaikan.

Tiga kios lainnya masih dalam tahap pendaftaran kembali. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian administrasi serta pendampingan operasional agar jaringan kios pangan dapat berfungsi lebih optimal.

4.5. Evaluasi Sidak Pasar, BBM, Jasa Laundry, dan Kerja Sama Distribusi

Sidak pasar, pemantauan BBM di SPBU, pemantauan jasa laundry, dan kerja sama distribusi bawang merah merupakan bagian dari pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh TPID serta perangkat daerah terkait.

Namun, karena data terperinci mengenai hasil sidak, temuan lapangan, dan tindak lanjut belum dicantumkan, efektivitas masing-masing kegiatan belum dapat diukur secara kuantitatif.

Untuk laporan berikutnya, setiap kegiatan perlu dilengkapi dengan indikator hasil, seperti jumlah sidak, lokasi, komoditas yang diperiksa, temuan, tindakan korektif, dan perkembangan harga atau pasokan setelah kegiatan.

4.6. Evaluasi Umum

Secara umum, berbagai kegiatan pengendalian harga dan ketahanan pangan telah dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Kegiatan tersebut meliputi pemantauan harga, penyaluran bantuan pangan, penyaluran CPPD, GPM, pengembangan kios pangan, sidak pasar, pemantauan BBM dan jasa laundry, serta kerja sama distribusi bawang merah.

Meskipun demikian, kenaikan harga cabai pada September menunjukkan bahwa tekanan harga masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Pengendalian harga ke depan perlu dilakukan secara lebih terarah dengan memperhatikan komoditas penyumbang utama, kondisi pasokan, serta perkembangan harga secara mingguan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

5.1. Penguatan Pemantauan Harga dan IPH

TPID perlu meningkatkan pemantauan harga komoditas strategis secara berkala, terutama cabai, beras, bawang merah, daging ayam ras, dan komoditas lain yang menunjukkan perubahan harga signifikan.

Data pemantauan Dinas Perdagangan dan data IPH perlu diintegrasikan sebagai dasar penentuan komoditas prioritas dan waktu pelaksanaan intervensi. Penulisan angka, satuan, dan periode pemantauan harus diseragamkan dan diverifikasi sebelum digunakan dalam laporan resmi.

5.2. Pengamanan Pasokan Cabai dan Penguatan Produksi Lokal

Untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Memperkuat koordinasi dengan distributor dan daerah pemasok cabai.
2. Memantau stok, volume pasokan, jadwal pengiriman, dan perkembangan harga.
3. Berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pertanian untuk mengidentifikasi penyebab penurunan produksi cabai lokal.
4. Mendorong penerapan budidaya cabai yang adaptif terhadap cuaca, termasuk pengelolaan air dan perbaikan drainase.
5. Mengatur pola tanam dan jadwal panen secara bertahap untuk menjaga kesinambungan pasokan.
6. Melaksanakan intervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga dan keterbatasan pasokan yang signifikan.

5.3. Penguatan Kerja Sama Antardaerah

Kerja sama dengan distributor bawang merah di Gorontalo perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan realisasi pengiriman, volume pasokan, kontinuitas distribusi, dan harga di pasar.

Kerja sama distribusi juga dapat diperluas untuk komoditas lain yang mengalami keterbatasan pasokan, berdasarkan hasil pemantauan harga dan kebutuhan daerah.

5.4. Optimalisasi Gerakan Pangan Murah

GPM perlu dilaksanakan secara selektif berdasarkan perkembangan harga, ketersediaan stok, dan kebutuhan masyarakat.

Prioritas pelaksanaan dapat diberikan kepada wilayah yang mengalami kenaikan harga atau memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terjangkau. Setiap kegiatan perlu dilengkapi dokumentasi mengenai volume komoditas, harga jual, jumlah pembeli, realisasi penjualan, dan hasil pemantauan harga setelah kegiatan.

5.5. Penguatan Penyaluran Bantuan Pangan dan CPPD

Pengawasan penyaluran bantuan pangan perlu terus ditingkatkan untuk memastikan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kesesuaian jumlah bantuan.

Penyaluran CPPD perlu diarahkan sesuai kebutuhan daerah rawan pangan dan dilengkapi pemantauan penerima serta realisasi penyaluran. Data bantuan pangan reguler dan CPPD harus tetap dicatat secara terpisah agar evaluasi setiap program dapat dilakukan secara tepat.

5.6. Optimalisasi Kios Pangan

Dinas Ketahanan Pangan perlu mendorong kios pangan aktif untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

Tiga kios yang masih dalam tahap pendaftaran kembali perlu mendapatkan pendampingan administratif. Evaluasi kinerja kios perlu menggunakan indikator jumlah kios aktif, volume penyaluran, jenis komoditas, harga jual, dan jangkauan penerima manfaat.

5.7. Penguatan Pengawasan Pasar dan Distribusi

Sidak pasar dan pemantauan BBM perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi berwenang. Temuan lapangan harus disertai tindak lanjut yang jelas.

Pemantauan jasa laundry dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah, dengan pencatatan tarif dan faktor biaya secara terpisah dari pemantauan harga pangan.

5.8. Penguatan Koordinasi dan Evaluasi TPID

Koordinasi lintas perangkat daerah perlu ditingkatkan dalam pengumpulan data harga, pasokan, distribusi, dan pelaksanaan program pengendalian harga.

Setiap kegiatan perlu memiliki indikator keberhasilan, perangkat daerah penanggung jawab, target waktu, dan dokumentasi hasil agar tindak lanjut dapat dievaluasi secara berkala.

PENUTUP

Pelaksanaan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Triwulan III Tahun 2026 dilakukan melalui pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting, pengawasan penyaluran bantuan pangan, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, pengembangan kios pangan, sidak pasar, pemantauan BBM dan jasa laundry, serta kerja sama distribusi bawang merah dengan distributor di Gorontalo.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa perkembangan harga selama Juli–September 2026 bervariasi, dengan kenaikan paling menonjol pada cabai merah keriting dan cabai rawit merah pada September. Keterbatasan pasokan dan penurunan produksi cabai lokal yang diduga berkaitan dengan cuaca ekstrem menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi pasokan dan dukungan terhadap produksi lokal.

Ke depan, TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan akurasi data IPH dan pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan produksi pangan lokal, serta memastikan seluruh program pengendalian harga berjalan tepat sasaran dan terukur.

Demikian laporan TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Triwulan III Tahun 2026 disusun sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian harga dan ketahanan pangan serta dasar perumusan kebijakan pada periode berikutnya.